

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengan essensi kebijakan otonomi daerah yang bergulir dewasa ini telah menempatkan kabupaten dan kota sebagai titik berat otonomi nampaknya akan memberi harapan yang lebih baik bagi daerah untuk dapat mengembangkan diri. Otonomi juga memberikan harapan bagi masyarakat untuk dapat menikmati pelayanan publik yang lebih baik dan terciptanya iklim demokrasi di daerah serta memunculkan harapan baru bagi masyarakat untuk memperoleh kebijakan-kebijakan daerah yang lebih mementingkan nasib mereka daripada hanya sekedar mengakomodasikan keinginan pemerintah pusat sebagaimana yang telah terjadi di masa yang lalu.

Otonomi daerah dengan berbagai harapan yang di dalamnya bukan lagi hanya merupakan suatu retorika belaka namun telah menjadi realita yang harus ditangani dengan semangat untuk semakin memajukan kehidupan masing-masing daerah dalam suatu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi daerah dengan harapan yang ada di

dalamnya harus senantiasa disikapi dengan kerja keras agar semua harapan yang diinginkan oleh kebijakan otonomi daerah dapat segera terwujud.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaan lainnya termasuk Peraturan Daerah.

Menurut Insukindro,dkk (1994:1) dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, Pendapatan Asli Dearah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kreteria untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

Koswara dalam Yusuf Syawal (2001; 33) menyatakan bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah harus memiliki kewenangan

dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan pada Pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan daerah disamping penerimaan lainnya berupa dan perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan daerah yang sah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, sebagaimana yang dikatakan oleh Santoso (1995:20) bahwa proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi "derajat kemandirian" keuangan suatu pemerintah daerah.

Kabupaten Serdang Bedagai adalah kabupaten yang dimekarkan dari kabupaten Deli Serdang dan dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Pemekaran Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 15 Januari 2004.

Sebagai daerah otonom, Kabupaten Serdang Bedagai dituntut untuk dapat memiliki kemandirian terutama dalam hal penggalian dan pengelolaan

sumber-sumber keuangan daerah. Salah satu komponen PAD yang menjadi andalan adalah penerimaan dari retribusi daerah, seperti yang terlihat pada tabel 1 memperlihatkan besarnya salah satu jenis penerimaan daerah, yaitu besarnya penerimaan retribusi pasar dan besarnya penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Serdang Bedagai.

**Tabel 1**  
**Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar dan Retribusi Daerah**  
**di Kabupaten Serdang Bedagai, 2004 - 2007**

Tahun Anggaran	Retribusi Pasar (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Total Penerimaan Daerah (Rp)
2004	98.956.500	779.582.094,50	1.589.795.358,50	20.724.212.393,50
2005	164.926.000	1.656.909.101,20	9.820.991.878,70	47.695.882.966,70
2006	215.980.250	2.990.753.130	10.463.855.142	59.288.324.050,00
2007	180.810.000	3.387.107.906	7.419.809.781	30.988.867.639,00

Sumber: Dispenda Kabupaten Serdang Bedagai, Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah, 2007

Berdasarkan tabel 1 retribusi pasar sebagai salah satu jenis penerimaan daerah dapat dijadikan andalan penerimaan di sektor retribusi daerah. Hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh Santoso (1995:20) bahwa retribusi pasar di banyak daerah kabupaten dan kota di Indonesia menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang cukup berarti. Retribusi pasar akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian suatu daerah untuk mampu mendanai sendiri segala urusan otonomi daerah.

Berdasarkan uraian diatas, kajian tentang retribusi pasar dapat dikaji lebih menarik terutama pada sisi potensi penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kajian ini dilandasi oleh dua hal, yaitu (1) berdasarkan data yang ada pada Dinas Pendapatan Kabupaten Serdang Bedagai, bahwa pada empat tahun terakhir penerimaan retribusi pasar selalu tidak dapat mencapai/ melampaui target yang telah ditetapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa penetapan target penerimaan selama ini masih dibawah potensi penerimaan retribusi pasar. Dengan demikian masih adanya peluang dan kesempatan untuk dapat meningkatkan penerimaan retribusi pasar, dan (2) di Kabupaten Serdang Bedagai belum pernah diadakan penelitian tentang potensi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Serdang Bedagai?
2. Bagaimanakah tingkat pertumbuhan Retribusi Daerah dan Retribusi Pasar di Kabupaten Serdang Bedagai?

3. Bagaimanakah pengaruh faktor-faktor penerimaan pasar terhadap penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Serdang Bedagai?
4. Bagaimanakah tingkat efisiensi dan efektivitas retribusi pasar di Kabupaten Serdang Bedagai?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerimaan retribusi pasar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yang dapat dirinci sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan retribusi daerah dan retribusi pasar di Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan faktor-faktor pasar terhadap penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi pasar berdasarkan target penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Serdang Bedagai.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain adalah :

1. Bagi Pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai, dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Pasar.
2. Memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan tentang Retribusi Pasar.
3. Diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi para peneliti yang melakukan penelitian tentang retribusi pasar.